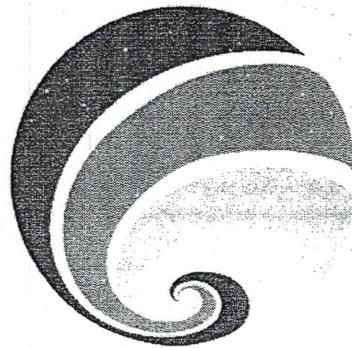




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**RENCANA KERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA – SKPD)**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya lah, kami dapat membuat dan menyelesaikan bahan Rencana Kerja Tahun 2023 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai.

Dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Rencana Kerja ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki 3 (tiga) urusan wajib yaitu komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika sudah maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2021 tapi masih ada saja yang kurang seperti masih kurangnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang tersedia belum mengakomodir program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika di karenakan masa Covid - 19 saat. Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Tuapejat, Juli 2022



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
KERANGKA ACUAN	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 LATAR BELAKANG.....1
	1.2 LANDASAN HUKUM.....3
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....4
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....14
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....17
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....22
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....23
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....24
	3.3 Program dan Kegiatan.....24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....29
BAB V	PENUTUP.....33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hirarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan modifikasi makna dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rencana Kerja Perangkat Daerah ((RKPD ) Kabupaten Kepulauan mentawai, Rencana Strategi ( RENSTRA ) dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dokumen ini merupakan suatu pedoman penyusunan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi dokumen ini juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penentuan efisiensi optimalisasi pelaksanaan agenda program kegiatan.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok-pokok pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Agenda program kegiatan yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung oleh dokumen yang terorganisir dan terencana sesuai menurut Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara teknis, dokumen ini sudah merupakan konsekuensi logis bagi

perangkat daerah yang hendak memformulasikan berbagai ide dan masukan dari spektrum yang lebih luas.

Salah satu pertimbangan dan indikator untuk memacu keberhasilan kinerja sesuai menurut standar pelayanan minimal dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, adalah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, disamping dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dianggap telah terlaksana maupun dihadapi.

Untuk terjaminnya pelaksanaan program kegiatan secara optimal, efektif, efisien dan terencana, maka setiap proses perencanaan perlu dilakukan berbagai tahapan yang salah satu diantaranya yakni regulasi yang baik dan memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai menurut hukum normatif.

Dokumen ini disamping sebagai agenda dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bertujuan sebagai kerangka dalam mewujudkan pelayanan publik kearah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016, maka secara hukum administrasi kebijakan publik, dinas tersebut memiliki peran dan tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan daerah dan mengaktualisasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, tanggungjawab dan beban kerja yang semakin berat dalam pengambilan sebagian urusan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika apalagi masih dalam masa pandemic Covid -19 saat ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut perlu memperhatikan dan menetapkan berbagai langkah-langkah dalam upaya penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

#### **a. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**b. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

**c. Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika ;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

**1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2000;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
  - h. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
  - i. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - j. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  - k. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota;
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

- a. Sebagai langkah untuk konsistensi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kepulauan Mentawai.
- b. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.

- c. Sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan dan menentukan pelaksanaan program prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 2. Tujuan

- a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah.
- c. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam perencanaan dan pembangunan.

Disusunnya rencana kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunika dalam penyusunan perencanaan dan menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 yang menginflementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan capaian Renstra OPD kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya.

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan tahun 2021 dan capaian renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana strategis Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terdapat 3 Program pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

Dari tiga jumlah program tersebut terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Semua program dan kegiatan realisasi keuangan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan tapi belum maksimal, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program /kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan apalagi dimasa pandemic covid -19 yang terjadi saat ini, akan tetapi ada kegiatan yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan semestinya.

- b. Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil /Keluaran Yang direncanakan.

Pada dasarnya program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun yang lalu sudah memenuhi target yang direncanakan, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.392.505.957,- (95,92%).

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.893.157.400,- (97,31%).

**b. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.2.563.500,- (83,62%).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.75.797.600,- (99,31%).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.16.581.000,- (20,98%).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.5.000.000,- (33,33%).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.104.754.556,- (62,25%).

**c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.22.729.300,- (84,31%).

**d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 50.081.129,- (23,08%).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.24.999.000,-(100%).

**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.43.785.895,- (Rp.94,53%).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.189.690.000,- (99,78%).

**II. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

**a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp.88.773.300,- (95,44%).
- Pelayanan Informasi Publik Rp.9.117.500,- (100%).
- Layanan Hubungan Media Rp. 7.568.500,- (99,70%).
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Rp.6.323.000,- (76,36%).
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Rp.9.992.500,- (93,69%).

### III. Program Aplikasi Informatika

#### **Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetap oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp.2.655.270.477,- (96,40%).
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Rp.483.467.900,- (62,64%).
- c. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk Program /Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun yang lalu tidak ada yang melebihi target hasil /keluaran yang direncanakan, untuk hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat di tabel C.29 sebagai berikut :

Tabel T.C-29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Keplatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2021			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	
					Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	20.950.000					20.950.000	20.950.000	1
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2 16 01 2.02 02	Penyediaan jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor PA, PPTK, PPK dan pegawai kontrak	7.070.000.000	2.237.365.401	917.846.000	893.157.400	97,31	105.346.000	3.235.868.801	0
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000	7.890.000	3.065.500	2.563.500	83,62	3.065.500	13.519.000	0
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya alat tulis kantor, makan minum pegawai	455.645.000	73.252.000	76.327.600	75.797.600	99,31	72.740.600	221.790.200	0
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	51.054.750	17.459.600	79.020.500	16.581.000	20,98	13.408.500	47.449.100	1
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.300.000.000	274.850.000	15.000.000	5.000.000	33,33	19.995.000	299.845.000	0
2	16	01	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.800.000.000	520.163.415	168.284.000	104.754.556	62,25	168.701.000	793.618.971	0
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	600.000.000	59.850.700				31.749.900	91.600.600	0
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang diadakan	2.500.000.000	270.965.400	26.958.300	22.729.300	84,31	30.680.000	324.374.700	0
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya</b>								
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, internet	4.293.000.000	2.237.365.401	217.000.000	50.081.129	23,08	250.000.000	2.537.446.530	1
2	16	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya alat Pelayanan Umum	125.000.000	34.488.500	24.999.000	24.999.000	100,00		59.487.500	0
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional sebanyak 1 unit kendaraan roda 4	250.000.000	73.252.000	46.320.000	43.785.895	94,53	50.000.000	167.037.895	1
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	1.500.000.000	-	190.110.000	189.690.000	99,78	99.996.000	289.686.000	0

2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota										
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	1.500.000.000	280.157.500	93.019.574	88.773.300	95,44	368.930.800	0	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi yang tersedia	1.750.000.000	75.147.000	9.117.500	9.117.500	100,00	274.391.543	358.656.043	0
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama kemitraan dengan media komunikasi publik non pemerintah	750.000.000	1.070.300.500	7.591.000	7.568.500	99,70	1.077.869.000	1	
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah juknis layanan informasi publik yang ditetapkan	350.000.000	32.705.625	8.280.500	6.323.000	76,36	39.028.625	0	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pelaksanaan dan pemberdayaan Forum KIM	400.000.000	219.450.000	10.666.000	9.992.500	93,69	372.099.900	601.542.400	2
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Tower Radio dan Link Pemancar Radio yang Diadakan						618.569.306	618.569.306	
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem jaringan internet satu pintu	15.000.000.000	91.908.582	2.754.461.540	2.655.270.477	96,40	3.240.105.000	5.987.284.059	0
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										

2	16	03	2.02	07	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah koordinasi dan fasilitas pembangunan BTS dan Akses Internt	900.000.000	591.887.448	777.819.500	483.467.900	62,16	394.925.800	1.470.281.148	2
---	----	----	------	----	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------------	---------------	---

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.  
Untuk program dan kegiatan tahun yang lalu Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak mencapai target kinerja yang sudah ditentukan disebabkan oleh beberapa factor antara lain : Keadaan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sehingga apa yang sudah diatargetkan tidak berjalan sesuai rencana yang sudah ditargetkan.
- e. Impilikasi Yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.  
Perubahan indikator kinerja dan target capaian program renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.
- f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.
- Melakukan Monitoring, evaluasi atas pekerjaan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
  - Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
  - Mengambil kebijakan/Tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi perangkat daerah. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah staf dalam rangka optimalisasi tupoksi.
- b. Kurangnya tenaga SDM khususnya yang menangani masalah IT.
- c. Masih adanya daerah yang blank spot.

Berikut Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2020	2021	2020	2021	
1	Persentase Pembangunan Sarana Komunikasi dan Informatika Yang Berfungsi Dengan Baik	85%	86%	87%	88%	86%	86%	86	86	
2	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi	3	3	3	3	1	1	1	1	
3	Jumlah Nilai SPBE	1,89	2,1	2,4	2,7	-	-	1,97	1,97	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT keterbukaan informasi publik saat ini baik antar sektor lingkungan pemerintah, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintahan dengan masyarakat masih belum maksimal.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-government daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang semakin baik adalah salah satu tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh pihak, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-government sebagai wujud pelayanan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kurang maksimalnya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu terwujudnya konektifitas wilayah dan akses informasi yang berkualitas dan merata.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki bidang komunikasi dan informatika kabupaten kepulauan mentawai dari sisi internal antara lain : perlunya ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK dan yang tidak kalah penting adalah anggaran yang mendukung. Dari sisi eksternal peluang yang harus dimiliki antara lain kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan layanan jaringan komunikasi dan informatika yang berkualitas dan merata, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategis antara lain :

**a. Kesekretariatan**

- Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi seperti : akuntan, arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan administrasi.
- Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017.

**b. Bidang Komunikasi**

- Masih kurangnya kualitas SDM bidang komunikasi.
- Kurangnya SDM dibidang komunikasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana bidang komunikasi.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
- Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi komunikasi.

**c. Bidang Informatika**

- Belum adanya grand desegn pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
- Belum tersedianya regulasi pengelolaan teknologi informasi.
- Masih terjadinya tumpang tindih pengelolaan teknologi informasi.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja ) 2023 Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai, cocok atau tidak cocok besarnya (anggaran/volume/satuan ) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 berdasarkan tabel sebagai berikut Tabel T-C.31 :

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023  
Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Rencana Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				13.914.593.571	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				13.914.593.571	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.914.593.571	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.914.593.571	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000					80.000.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	40.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.497.220.607	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.497.220.607	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 org	2.461.220.607	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Org	2.461.220.607	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 dok	36.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 dok	36.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 persen	370.013.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 persen	370.013.000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	3.060.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	3.060.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	4 paket	85.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	4 Paket	85.000.000	

2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kominfo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	65.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kominfo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	65.000.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	12.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	12.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Lap	204.953.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Lap	204.953.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	71.363.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	71.363.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kominfo	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	34.999.000	Pengadaan Mebel	Kominfo	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	34.999.000
2.16.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 paket	36.364.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 paket	36.364.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.109.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1.109.100.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 lap	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 lap	120.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	5 lap	989.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	5 lap	989.100.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 persen	194.917.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 persen	194.917.850
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kominfo	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	64.995.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kominfo	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	64.995.850
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 paket	49.930.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 paket	49.930.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	79.992.000	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	79.992.000
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	5 persen	1.249.999.900	Program Informasi dan Komunikasi Publik	5 persen	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		1.249.999.900

2.16.07.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	5 persen	1.249.999.900	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	5 persen	1.249.999.900
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dok	150.000.000	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 Dok	150.000.000
2.16.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Tuapejat	Jumlah layanan hubungan media	1 layanan	650.000.000	Layanan hubungan media	Tuapejat	Jumlah layanan hubungan media	1 layanan	650.000.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tuapejat	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 dok	250.000.000	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tuapejat	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 dok	250.000.000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kep Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diadakan	4 paket	199.999.900	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kep Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diadakan	4 paket	199.999.900
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	70 persen	3.282.378.340	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	70 persen	3.282.378.340
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah domain yang dikelola	3 domain	2.782.378.340	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah domain yang dikelola	3 domain	2.782.378.340
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.782.378.340	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.782.378.340
2.16.03.2.02	Pengelolaan E government di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota		Nilai indeks spbe	1,5 indeks	500.000.000	Pengelolaan E government di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota		Nilai indeks spbe	1,5 indeks	500.000.000
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dok	250.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dok	250.000.000
2.16.03.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah		Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	9 dok	300.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah		Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	9 dok	300.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	90 persen	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	90 persen	40.000.000

2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000					500.000.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep Mentawai	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dok	150.000.000	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dok	150.000.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota				250.000.000					250.000.000	
2.21.02.2.02.01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	26 OPD	250.000.000	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	26 OPD	250.000.000	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika banyak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa tower untuk komunikasi. Akan tetapi karena anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas tidak bisa terpenuhi. Akan tetapi Dinas Komunikasi dan informatika dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi yang memadai dibantu oleh BAKTI dalam pembangunan tower BTS berdasarkan usulan dari masyarakat yang sampai saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk lebih memaksimalkan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi semua tergantung pada semua pihak terutama pemerintah daerah, agar kedepannya apa yang sama-sama diharapkan tercapai terutama untuk kemajuan komunikasi dan informatika di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat di lihat dari tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32

### Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dusun Cimpungan Desa Matobe Kecamatan Sikakap	Tersedianya Tower BTS	1 Unit	Usulan diterima dan akan diusulkan ke BAKTI
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dusun Surat Aban Kecamatan Pagai Selatan	Tersedianya Tower BTS	1 Unit	Usulan diterima dan akan diusulkan ke BAKTI

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal. Adapun lima prioritas nasional yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Rencana Kerja (Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi adapun arah kebijakan pembangunan daerah 2023-2026 yaitu : “ *Percepatan pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Daerah* “.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan perangkat daerah.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah *Meningkatnya Sistem Komunikasi dan Informatika Serta SPBE.*

#### b. Sasaran

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan tujuan dan sasaran rencana kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
berdasarkan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dengan berubahnya Pemendagri Nomor 90 Tahun 2021 ke Peraturan Permendagri Nomor 050 Tahun 2021 struktur organisasi bidang komunikasi dan informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu Non Urusan, urusan komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta urusan persandian . Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kepulauan Mentawai pada Tahun 2023 adalah tabel-C.33 sebagai berikutTabel :

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan dan Prakiran Maju Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 16	Komunikasi dan Informatika								
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan Phyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Kominfo						
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen					
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	6 dokumen	40.000.000	DAU		6 dokumen	50.000.000
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen					
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kominfo	21 orang	2.461.220.607	D A U		21 orang	2.600.000.000
2 16 01 2.02 02	Penyediaan jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kominfo	2 dok	36.000.000	D A U		2 dok	37.000.000
2 16 01 2.06 02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 persen					
2 16 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kominfo	3 paket	3.060.000	D A U		3 paket	4.000.000
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	Kominfo	4 paket	85.000.000	DAU		4 paket	87.000.000
2 16 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kominfo	4 paket	65.000.000	D A U		4 paket	70.000.000

2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kominfo	1 dok	12.000.000	D A U		1 dok	13.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	30 laporan	204.953.000	D A U		30 laporan	250.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen					
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Kab.Kep. Mentawai	2 paket	34.999.000	D A U		2 paket	36.000.000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab.Kep. Mentawai	2 paket	36.364.000	DAU		2 paket	37.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen					
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	kominfo	3 laporan	120.000.000	D A U		3 laporan	120.000.000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	kominfo	5 laporan	989.100.000	D A U		5 laporan	1.060.000.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pemerintah daerah		100 persen					
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab.Kep. Mentawai	1 unit	85.000.000	DAU		1 unit	85.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kab.Kep. Mentawai	8 paket	49.930.000	DAU		8 paket	50.000.000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab.Kep. Mentawai	1 gedung	79.992.000	DAU		1 gedung	86.000.000
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		5 persen					
2	16	02	2.01		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		5 persen					
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	1 dokumen	150.000.000	D A U		1 dokumen	170.000.000

2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Kep mentawai	1 layanan	650.000.000	D A U		1 layanan	670.000.000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Kab. Kep mentawai	1 dokumen	250.000.000	D A U		1 dokumen	260.000.000
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang diadakan	Kab. Kep mentawai	4 paket	199.999.900	DAU		4 paket	200.000.000
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan dinas kominfo		70 persen					
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain yang dikelola		3 domain					
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep mentawai	31 unit	2.782.378.340	DAU		31 unit	2.900.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai indeks SPBE		1,5 indeks					
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Kep mentawai	1 dok	200.000.000	DAU		Unit	250.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi penda	Kab. Kep. Mentawai	9 Dokumen	300.000.000	D A U		Dokumen	350.000.000
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	Kab. Kep. Mentawai	90 persen					
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral		10 OPD					
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral	Kab. Kep. Mentawai	1 dokumen	40.000.000	D A U		1 dokumen	150.000.000

2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
2	21	02	01		Penyelenggaraan pesandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota								
2	21	02	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan elektronik	Kab.Kep. Mentawai	1 laporan	300.000.000	DAU		1 laporan	300.000.000
2	21	02	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kab.Kep. Mentawai	Opd	300.000.000	DAU		opd	300.000.000
2	21	02	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	21	02	01	01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Kab.Kep. Mentawai	Opd	250.000.000	DAU		opd	250.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Rencana Kerja (Renja ) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika sangat di harapkan dalam masa Pandemi Covik 19 di saat ini dalam penyebaran informasi baik melalui media elektronik, media massa dan media online Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diharapkan perannya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Adapun Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Permendagri Nomor 50 tahun 2021 maka program,kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Program dan Kegiatan  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana		
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub kegiatan		Hasil Kegiatan/ Sub kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3						10	11			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.726.931.481				
2	16	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika										
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen			100 persen	5.398.878.171			
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000			
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	40.000.000	DAU
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase terlaksananya administrasi keuangan	2 jenis	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 jenis	4.120.593.571	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang	Terbayarnya Gaji ASN	21 orang	2.497.220.607	DAU
2	16	01	2.02	02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	54 orang	Terbayarnya honor PA, PPTK, PPK dan pegawai kontrak	54 orang	1.428.548.000	DAU
2	16	01	2.06	Administrasi Umum perangkat daerah			Persentase terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	5 jenis			309.214.600	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 paket	3.060.000	DAU
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	4 paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 paket	85.000.000	DAU
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 paket	65.000.000	DAU

2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kepulauan Mentawai			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	Meningkatnya wawasan aparatur	1 dok	12.000.000	DAU
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat	30 laporan	204.953.000	DAU
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	100 persen			71.363.000	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Mentawai			Jumlah paket mebel yang diadakan	2 paket	Tersedianya Mebel kantor	2 jenis	34.999.000	DAU
2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Kep. Mentawai			Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 paket	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2 paket	36.364.000	DAU
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			1.109.100.000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab. Kep. Mentawai			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang disediakan	3 laporan	Terbayarnya rekening listrik, air dan internet	3 laporan	120.000.000	DAU
2	16	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kep. Mentawai			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 laporan	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	5 laporan	989.100.000	DAU
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			194.917.850	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Mentawai			Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Meningkatnya kualitas Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	64.995.850	DAU
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Diskominfo			Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 paket	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8 paket	49.930.000	DAU
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kep. Mentawai			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		79.992.000	DAU
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	5 Persen				1.249.999.900	
2	16	02	2.01		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah				Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten /kota	5 persen			1.249.999.900	

2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tuapejat			Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dokumen	Tersedianya pelayanan informasi publik		150.000.000	DAU
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Tuapejat			Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	Tersedianya layanan hubungan media		650.000.000	DAU
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Kab.Kep.Men.tawai			Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas	1 dok	Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas	1 dok	250.,000,000	DAU
2	16	02	2.01	14	Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten/kota	Kab.Kep.Men.tawai			Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang diadakan	4 paket	Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung informasi dan komunikasi	4 paket	199.999.900	DAU
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan dinas kominfo	70 persen					3.282.378.340	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				Jumlah domain yang dikelola	3 domain			2.782.378.340	
2	16	02	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab.Kep.Men.tawai			Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 Unit	Terlaksananya penyelenggaraan sistem jaringan pemerintah daerah	31 unit	2.782.378.340	DAU
2	16	03	2.02		Pengelolaan E government di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota				Nilai indeks SPBE			1,5 indeks	500.000.000	
2	16	01	2.02	02	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis	Kab.Kep.Men.tawai			Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis	1 Dok	Tersedia dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis	1 Dok	200.000.000	DAU
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab.Kep.Men.tawai			Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemma	9 Dok	Tersedianya dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	9 Dok	300.000.000	DAU
2	20	03			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah			90 persen			40.000.000	
2	20	07	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral	10 OPD			40.000.000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kab.Kep.Men.tawai			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral	1 Dok	Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral	1 Dok	40.000.000	DAU

## BAB V PENUTUP

Puji syukur kami ucapkan akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2022 dapat diselesaikan walau masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Dalam lingkup internal Rencana Kerja (renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 berfungsi sebagai acuan bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 .

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai utamanya bidang komunikasi dan informatika perlu mendapatkan perhatian serius mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Segala aspek kehidupan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan informatika. Demikian pula penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan E-goverment. Melalui E-goverment ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi antara lain bahwa saat ini konsep smart city belum terwujud di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa sumber daya aparatur di bidang komunikasi dan informatika sangat terbatas dan belum memadai, perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan kemampuan daerah untuk mengikutinya belum maksimal.

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menjembatani sehingga perkembangan teknologi informasi dapat berdaya guna

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Tuapejat, Juli 2022



KEPALA DINAS  
KEP. RI ROBERTY S.S.Kom.M.Kom  
NIP. 1960113 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**RENCANA KERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA – SKPD)**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya lah, kami dapat membuat dan menyelesaikan bahan Rencana Kerja Tahun 2024 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai.

Dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk mendukung pencapaian RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Kerja ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki 3 (tiga) urusan wajib yaitu komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika sudah maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023 tapi masih ada saja yang kurang seperti masih kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang berkopetensi dalam hal bidang IT. Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Tuapejat, Juli 2023

**KEPALA DINAS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**HERI ROBERTUS.S.S.Kom.M.Kom**  
**NIP. 19760113 200112 1 002**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**KERANGKA ACUAN**

**BAB I           PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5

**BAB II           HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22

**BAB III           TUJUAN, SASARAN,PROGRAM KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	24

**BAB IV           RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....29**

**BAB V           PENUTUP.....33**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hirarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan modifikasi makna dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD ) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rencana Strategi ( RENSTRA ) dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dokumen ini merupakan suatu pedoman penyusunan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi dokumen ini juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penentuan efisiensi optimalisasi pelaksanaan agenda program kegiatan.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok-pokok pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Agenda program kegiatan yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung oleh dokumen yang terorganisir dan terencana sesuai menurut Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara teknis, dokumen ini sudah merupakan konsekuensi logis bagi perangkat daerah yang hendak memformulasikan berbagai ide dan masukan dari spektrum yang lebih luas.

Salah satu pertimbangan dan indikator untuk memacu keberhasilan kinerja sesuai menurut standar pelayanan minimal dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, adalah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, disamping dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dianggap telah terlaksana maupun dihadapi.

Untuk terjaminnya pelaksanaan program kegiatan secara optimal, efektif, efisien dan terencana, maka setiap proses perencanaan perlu dilakukan berbagai tahapan yang salah satu diantaranya yakni regulasi yang baik dan memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai menurut hukum normatif.

Dokumen ini disamping sebagai agenda dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bertujuan sebagai kerangka dalam mewujudkan pelayanan publik kearah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maka secara hukum administrasi kebijakan publik, dinas tersebut memiliki peran dan tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan daerah dan mengaktualisasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, tanggungjawab dan beban kerja yang semakin berat dalam pengambilan sebagian urusan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memperhatikan dan menetapkan berbagai langkah-langkah dalam upaya penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

**a. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **b. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

## **c. Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika.
- d. Pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2000;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
  - h. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
  - i. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - j. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  - k. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota;
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

- a. Sebagai langkah untuk konsistensi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.
- b. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.
- c. Sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan dan menentukan pelaksanaan program prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **2. Tujuan**

- a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah.

- c. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam perencanaan dan pembangunan.

Disusunnya rencana kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunika dalam penyusunan perencanaan dan menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang menginflementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan capaian Renstra OPD kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya.

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan tahun 2022 dan capaian renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renscana strategis Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terdapat 3 Program pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

Dari tiga jumlah program tersebut terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Semua program dan kegiatan realisasi keuangan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan tapi belum maksimal, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program /kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan semestinya.

- b. Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil /Keluaran Yang direncanakan.

Pada dasarnya program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun yang lalu sudah memenuhi target yang direncanakan, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

###### a. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.226.556.308,- (88,17%).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 813.185.599,- (87,99%).

#### **b. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.3.366.000,- (100%).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.79.403.100,- (99,26%).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.12.252.250,- (83,56%).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.2.400.000,- (24,00%).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.293.839.016,- (90,77%).

#### **c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel Rp. 31.383.900,- ( 98,84).
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 30.672.200,- (99,97%).

#### **d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 81.276.347,- (62,52%).

#### **e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.46.345.800,- (Rp.91,05%).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.99.910.000,- (99,91%).

### **II. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

#### **a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Pelayanan Informasi Publik Rp.238.705.400,- (80,97%).
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Rp.351.087.300,- (83,17%).
- Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota Rp. 607.398.890,- (98,12).

### **III. Program Aplikasi Informatika**

#### **Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetap oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp.3.130.534.700,- (96,16%).
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Rp.567.689.000,- (95,36%).

c. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk Program /Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun yang lalu tidak ada yang melebihi target hasil /keluaran yang direncanakan, untuk hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat di tabel C.29 sebagai berikut :

**Tabel T.C-29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023					
					Target renja perangkat daerah tahun 2022	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2022	Tingkat realisasi( %)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
2	16	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Tugas Pokokm dan Fungsi Perangkat Daerah</b>										
2	16	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	40.000.000	-	-	-	40.000.000	1			
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	24.895.500	24.428.000	98,00	40.000.000	-	-
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2.337.868.456	-	3.449.537.532	3.039.741.907	88,00	2.541.220.616	2.267.940.966	0,97
2	16	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	2.525.373.532	2.226.556.308	88,00	2.461.220.616	-	-
2	16	01	2.02	02	Penyediaan jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor PA, PPTK, PPK dan pegawai kontrak	-	4.281.789.101	924.164.000	813.185.599	87,00	80.000.000	-	-
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		304.644.000	-	431.698.850	391.260.336	90,63	370.065.500	304.644.000	1
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	-	67.948.700	3.366.000	3.366.000	100	3.065.500	-	-



2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	-	349.487.000	99.996.000	99.910.000	99,91	80.000.000	-	-
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		-	-	<b>1.335.910.547</b>	<b>1.197.191.590</b>	<b>89,61</b>	-	-	-
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>592.106.200</b>	-	<b>1.335.910.547</b>	<b>1.197.191.590</b>	<b>89,61</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>592.106.200</b>	<b>1</b>
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi yang tersedia	-	1.335.922.707	294.791.543	283.705.400	96,23	150.000.000	-	-
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama kemitraan dengan media komunikasi publik non pemerintah	-	-	-	-	-	650.000.000	-	-
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah juknis layanan informasi publik yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pelaksanaan dan pemberdayaan Forum KIM	-	9.992.500	422.099.800	351.087.300	83,17	250.000.000	-	-
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Tower Radio dan Link Pemancar Radio yang Diadakan	-	-	619.019.204	607.398.890	98,12	200.000.000	-	-
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		-	-	<b>3.850.645.800</b>	<b>3.698.223.700</b>	<b>96,04</b>	-	-	-
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.205.200.000</b>	-	<b>3.255.380.000</b>	<b>3.310.543.700</b>	<b>101,69</b>	<b>3.060.000.000</b>	<b>3.205.200.000</b>	<b>1</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem jaringan internet satu pintu	-	6.669.580.594	3.255.380.800	3.130.543.700	101,69	3.060.000.000	-	-
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>240.633.800</b>	-	<b>595.265.800</b>	<b>567.689.000</b>	<b>95,36</b>	<b>500.000.000</b>	<b>240.633.800</b>	<b>1</b>
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-

2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah koordinasi dan fasilitas pembangunan BTS dan Akses Internt	-	1.009.835.148	595.265.800	483.467.900	81,21	300.000.000	-	1,6
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40.000.000</b>		-
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40.000.000</b>	-	-
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	-	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.  
Untuk program dan kegiatan tahun yang lalu Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada yang tidak mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.
- e. Implikasi Yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.  
Perubahan indikator kinerja dan target capaian program renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.
- f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.
- Melakukan Monitoring, evaluasi atas pekerjaan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
  - Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
  - Mengambil kebijakan/Tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi perangkat daerah. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah staf dalam rangka optimalisasi tupoksi.
- b. Kurangnya tenaga SDM khususnya yang menangani masalah IT.
- c. Masih adanya daerah yang blank spot.

Berikut Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tabel T-C.30 sebagai berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			
		2023	2024	2025	2026
1	1.Persentase Layanan Elektronik Terhadap Masyarakat	20	30	40	45
	2. Nilai Indeks SPBE	2	2,2	2,4	2,6
2	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat	70	75	80	85
3	1.Nilai LAKIP	71,45	72,45	73,45	74,55
	2.Jumlah Inovasi	1	1	2	2
	3Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT keterbukaan informasi publik saat ini baik antar sektor lingkungan pemerintah, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintahan dengan masyarakat masih belum maksimal.

Sistem layanan pemerintahan (E-goverment) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-goverment daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang semakin baik adalah salah satu tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan kegiatan SPBE digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh pihak, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-goverment sebagai wujud pelayanan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kurang maksimalnya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu terwujudnya konektivitas wilayah dan akses informasi yang berkualitas dan merata.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki bidang komunikasi dan informatika kabupaten kepulauan mentawai dari sisi internal antara lain : perlunya ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK dan yang tidak kalah penting adalah anggaran yang mendukung. Dari sisi eksternal peluang yang harus dimiliki antara lain kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan layanan jaringan komunikasi dan informatika yang berkualitas dan merata, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategis antara lain :

**a. Kesekretariatan**

- Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi seperti : akuntan, arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan administrasi.
- Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017.

**b. Bidang Komunikasi**

- Masih kurangnya kualitas SDM bidang komunikasi.
- Kurangnya SDM dibidang komunikasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana bidang komunikasi.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
- Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi komunikasi.

**c. Bidang Informatika**

- Belum adanya grand design pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
- Belum tersedianya regulasi pengelolaan teknologi informasi.
- Masih terjadinya tumpang tindih pengelolaan teknologi informasi.

**2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja ) 2023 Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai, cocok atau tidak cocok besarnya (anggaran/volume/satuan ) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 berdasarkan tabel sebagai berikut Tabel T-C.31 :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.613.031.779	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.613.031.779	
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				8.613.031.779	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				8.613.031.779	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.134.831.779	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.134.831.779	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.999.900	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	29.999.900	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.268.115.779	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.319.499.668	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.232.115.779	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.283.499.668	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	36.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	36.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Prangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 persen	555.000.000	Administrasi Umum Prangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 persen	295.799.000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	4 paket	199.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	4 paket	83.581.200	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kominfo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	75.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kominfo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	31.351.800	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	16.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	15.990.000	

2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Lap	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Lap	149.876.000	
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>140.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>113.261.214</b>	
<b>2.16.01.2.07.05</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kominfo	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kominfo	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	40.000.000	
<b>2.16.01.2.07.06</b>	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	50.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	73.261.214	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>831.716.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>715.372.000</b>	
<b>2.16.01.2.08.02</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 lap	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 lap	112.300.000	
<b>2.16.01.2.08.04</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	5 lap	731.716.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	5 lap	603.072.000	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>100 persen</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>100 persen</b>	<b>152.249.250</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kominfo	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kominfo	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	49.999.450	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 paket	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 paket	52.250.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	49.999.800	
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kominfo	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>5 persen</b>	<b>1.169.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kominfo	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>5 persen</b>	<b>303.928.600</b>	
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>		<b>Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota</b>	<b>5 persen</b>	<b>1.169.000.000</b>	<b>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>		<b>Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota</b>	<b>5 persen</b>	<b>303.928.600</b>	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	80.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	49.999.000	

2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	113.300.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dok	289.000.000	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dok	34.155.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Tuapejat	Jumlah layanan hubungan media	1 layanan	400.000.000	Layanan hubungan media	Tuapejat	Jumlah layanan hubungan media	1 layanan	11.899.800	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tuapejat	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 dok	100.000.000	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tuapejat	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 dok	49.999.800	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kep Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diadakan	4 paket	100.000.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kep Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diadakan	4 paket	44.575.000	
2.16.03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo</b>	<b>70 persen</b>	<b>3.307.200.000</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo</b>	<b>70 persen</b>	<b>303.928.600</b>	
2.16.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Jumlah domain yang dikelola</b>	<b>3 domain</b>	<b>2.785.200.000</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Jumlah domain yang dikelola</b>	<b>3 domain</b>	<b>2.779.995.000</b>	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.785.200.000	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.779.995.000	
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota</b>		<b>Nilai indeks spbe</b>	<b>1,5 indeks</b>	<b>522.000.000</b>	<b>Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota</b>		<b>Nilai indeks spbe</b>	<b>1,5 indeks</b>	<b>88.829.700</b>	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 unit	322.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 unit	49.975.700	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah		Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 dok	322.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah		Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 dok	38.854.000	
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase keterisian data pembangunan perangkat darah</b>	<b>90 persen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase keterisian data pembangunan perangkat darah</b>	<b>90 persen</b>	<b>81.934.800</b>	
2.20.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>81.934.800</b>	

2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep Mentawai	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dok	1.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep Mentawai	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dok	39.125.000	
2.21.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 dok	1.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 dok	42.809.800	

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika banyak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa tower untuk komunikasi. Akan tetapi karena anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas tidak bisa terpenuhi. Akan tetapi Dinas Komunikasi dan informatika dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi yang memadai dibantu oleh BAKTI dalam pembangunan tower BTS berdasarkan usulan dari masyarakat yang sampai saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk lebih memaksimalkan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi tergantung pada semua pihak terutama pemerintah daerah, agar kedepannya apa yang sama-sama diharapkan tercapai terutama untuk kemajuan komunikasi dan informatika di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal. Adapun lima prioritas nasional yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Rencana Kerja (Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi adapun arah kebijakan pembangunan daerah 2023-2026 yaitu : “ ***Percepatan pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Daerah*** “.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan perangkat daerah.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah ***Meningkatnya Sistem Komunikasi dan Informatika Serta SPBE.***

### b. Sasaran

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan tujuan dan sasaran rencana kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dengan berubahnya Pmendagri Nomor 90 Tahun 2021 ke Peraturan Permendagri Nomor 050 Tahun 2021 struktur organisasi bidang komunikasi dan informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu Non Urusan, urusan komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta urusan persandian. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kepulauan Mentawai pada Tahun 2023 adalah tabel-C.33 sebagai berikutTabel :

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan dan Prakiran Maju Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.613.031.779				
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				8.613.031.779				
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.134.831.779				4.747.914.000
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.999.900				55.000.000
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	6 Dokumen	25.999.900	DAU		6 Dokumen	55.000.000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.268.115.779				2.597.000.000
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Diskominfo	20 Orang	2.283.449.668	D A U		20 orang/bulan	2.550.000.000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Diskominfo	1 Dokumen	36.000.000	D A U		1 Dokumnen	47.000.000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Prangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			555.000.000				660.000.000
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Diskominfo	1 Paket	15.000.000	D A U		1 Paket	17.000.000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	Diskominfo	4 Paket	83.583.200	DAU		4 Paket	200.000.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Diskominfo	4 Paket	31351	D A U		4 Paket	76.000.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Diskominfo	1 Dokumen	16.000.000	D A U		1 dok	17.000.000

2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	40 Laporan	119.251.000	D A U		40 laporan	350.000.000
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>140.000.000</b>				<b>160.000.000</b>
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	2 Unit	40.000.000	D A U		2 paket	100.000.000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Diskominfo	3 Unit	73.261.000.000	DAU		3 unit	60.000.000
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>831.716.000</b>				<b>925.914.000</b>
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Diskominfo	4 Laporan	100.000.000	D A U		4 laporan	110.000.000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	Diskominfo	1 Laporan	731.716.000	D A U		1 laporan	815.914.000
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>			<b>300.000.000</b>				<b>350.000.000</b>
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Diskominfo	1 Unit	112.300.000	DAU		1 unit	120.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Diskominfo	4 Unit	50.000.000	DAU		4 unit	60.000.000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Diskominfo	1 Unit	150.000.000	DAU		1 unit	170.000.000
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>			<b>1.169.000.000</b>				<b>1.625.000.000</b>
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota</b>	Tuapejat		<b>1.169.000.000</b>				<b>1.625.000.000</b>
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	1 Dokumen	80.000.000	D A U		1 dokumen	150.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	1 Dokumen	200.000.000	D A U		1 dokumen	250.000.000

2	16	02	2.01	06	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	1 Dokumen	289.000.000	D A U		1 dokumen	295.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	Tuapejat	1 Layanan	400.000.000	DAU		1 layanan	600.000.000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Tuapejat	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 dokumen	170.000.000
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diadakan	Kab. Kep Mentawai	1 Unit	100.000.000	DAU		1 unit	160.000.000
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo</b>			<b>3.307.200.000</b>				<b>4.067.500.000</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah domain yang dikelola</b>			<b>2.785.200.000</b>				<b>3.305.500.000</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	31 Unit	2.785.200.000	DAU		31 Unit	3.305.500.000
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota</b>	<b>Nilai indeks spbe</b>			<b>522.000.000</b>				<b>762.000.000</b>
2	16	03	2.01	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab.Kep Mentawai	10 Unit	322.000.000	DAU		10 unit	432.000.000
2	16	03	2.01		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Kab.Kep Mentawai	1 Dokumen	200.000.000	DAU		1 dokumen	330.000.000
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase keterisian data pembangunan perangkat darah</b>			<b>2.000.000</b>	DAU			<b>400.000.000</b>
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.000.000</b>				<b>400.000.000</b>

2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kab. Kep Mentawai	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1 dokumen	150.000.000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Kep Mentawai	5 Dokumen	1.000.000	DAU		5 dokumen	250.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi baik melalui media elektronik, media massa dan media online Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diharapkan perannya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Adapun Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Permendagri Nomor 50 tahun 2021 maka program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2024**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana			
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub kegiatan				Hasil Kegiatan/ Sub kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								3.585.113.679		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								29.999.900		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Persentase Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	29.999.900	DAU	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.316.787.315	DAU	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.280.787.315	DAU	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	36.000.000	DAU	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								265.174.000	DAU	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	15.000.000	DAU	

2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	83.581.200	DAU
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	31.351.800	DAU
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	15.990.000	DAU
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	119.251.000	DAU
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>113.261.214</b>	<b>DAU</b>
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	40.000.000	DAU
2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	73.261.214	DAU
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>715.372.000</b>	<b>DAU</b>
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	100 Persen	112.300.000	DAU
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	100 Persen	603.072.000	DAU
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>114.519.250</b>	<b>DAU</b>
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kominfo	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 Persen	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	41.999.450	DAU

2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Persen	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	52.250.000	DAU
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	49.999.800	DAU
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kominfo							<b>303.353.600</b>	<b>DAU</b>
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>								<b>303.353.600</b>	<b>DAU</b>
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	persentase Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	7 Persen	49.999.000	DAU
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tuapejat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	persentase Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	7 Persen	113.300.000	DAU
2	16	02	2.01	06	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	persentase Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	7 Persen	34.155.000	DAU
2	16	02	2.01	07	Layanan hubungan media	Tuapejat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 Persen	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	persentase Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	7 Persen	11.899.800	DAU
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tuapejat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 Persen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	persentase Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	7 Persen	49.999.800	DAU

2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kep Mentawai	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	persentase Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	7 Persen	50.000.000	DAU
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>								<b>2.868.824.700</b>	<b>DAU</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>								<b>2.779.995.000</b>	<b>DAU</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	80 Persen	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	31 Unit	Jumlah Domain Yang Dikelola	10 Domain	2.779.995.000	DAU
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota</b>								<b>88.829.700</b>	<b>DAU</b>
2	16	03	2.01	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep Mentawai	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	20 Persen 80 Persen	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Unit	Nilai Indeks SPBE	1,8 Indeks	49.975.700	DAU
2	16	03	2.01		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	20 Persen 80 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Nilai Indeks SPBE	1,8 Indeks	38.854.000	DAU
2	20	02	2.01		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>								<b>81.934.800</b>	<b>DAU</b>

2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep Mentawai	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	15 Perangkat Daerah	39.125.000	DAU
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90 Persen	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	15 Perangkat Daerah	42.809.800	DAU

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Puji syukur kami ucapkan akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2022 dapat diselesaikan walau masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Dalam lingkup internal Rencana Kerja (renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berfungsi sebagai acuan bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 .

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai utamanya bidang komunikasi dan informatika perlu mendapatkan perhatian serius mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Segala aspek kehidupan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan informatika. Demikian pula penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan E-goverment. Melalui E-goverment ini pula diharapkan pelayanan publik dapat lebih maksimal, efektif dan efisien. Dengan menerapkan SPBE diharapkan dapat mengurangi upaya duplikasi dalam mendapatkan suatu pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan, mengurangi biaya dan waktu operasional layanan SPBE, dan meningkatkan kompetensi operator SPBE. Selain itu dengan manajemen pengetahuan yang baik, diharapkan pegawai dan organisasi pemerintahan dapat diberdayakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan SPBE. Karenanya diharapkan, setiap OPD di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berpartisipasi aktif dalam berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Pelaksanaan SPBE yang bermanfaat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan dapat meningkatkan kinerja individu dan instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, meningkatnya efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan dan meningkatnya ketahanan serta keberlanjutan proses bisnis dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi antara lain bahwa saat ini konsep smart city belum terwujud di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa sumber daya aparatur di bidang komunikasi dan informatika sangat

terbatas dan belum memadai, perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan kemampuan daerah untuk mengikutinya belum maksimal.

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menjembatani sehingga perkembangan teknologi informasi dapat berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Tuapejat, Juli 2023

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**HERI ROBERTUS.S, S.Kom. M.Kom**  
**NIP.19760113 200112 1 002**

